

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sejak akhir Desember 2019, di Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok, muncul wabah yang disebabkan oleh salah satu jenis betacoronavirus. Wabah ini menyebar dengan cepat dari 1 kota ke seluruh Negara dan kemudian dunia hanya dalam waktu 30 hari (Wu & McGoogan, 2020). Virus penyebab wabah memiliki kemiripan dengan Severe Acute Respiratory Syndrome hanya saja terdapat sejumlah perubahan asam amino sehingga kemudian diberi identitas sebagai SARS-CoV-2 (Sohrabi et al., 2020). Penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 kemudian disebut sebagai *Coronavirus Disease 2019* atau Covid-19 dan segera menjadi perhatian dunia terutama sejak ditetapkan sebagai pandemi karena telah menewaskan banyak manusia dilansir dari *Worldometers* pada Juli 2021, virus corona telah menginfeksi 182.912.981 orang di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, 167.419.823 orang telah dinyatakan sembuh dan 3.961.082 orang meninggal dunia akibat Covid-19.

Indonesia menjadi salah satu Negara yang terinfeksi virus tersebut yang setiap hari mengalami peningkatan, hingga pada bulan Januari sampai Maret 2021 kasus Covid-19 di Indonesia mengalami penurunan. Satgas Penanganan Covid-19 menyebutkan Indonesia telah menyentuh standar yang ditetapkan World Health Organization (WHO) yakni sebesar 1:1000 orang per minggu atau 276 ribu orang per minggu dengan total kasus per 28 Maret 2021 sebanyak 124.236 dengan presentase 8.30%. Namun, saat ini beberapa provinsi di Indonesia salah satunya DKI Jakarta mengalami kenaikan kasus harian covid-19 dengan jumlah total kasus hingga saat ini 2.256.851, bertambah 27.233 Kasus baru, dan 555 meninggal. Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menunjukkan DKI Jakarta sebagai provinsi penyumbang kasus terbanyak pada Mei hingga Juli 2021. DKI melaporkan 854 kasus harian dalam 24 jam. Kemudian 984 kasus sembuh dan 10 kasus

meninggal. Mengutip data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, total kasus di Ibu Kota mencapai 409.546 kasus, dengan 395.644 kasus sembuh, 6.747 kasus meninggal, dan 7.155 kasus aktif. Kasus tertinggi covid-19 di DKI Jakarta ditempati oleh Kecamatan tanah abang yang memiliki lebih dari 150 kasus berdasarkan sumber Jakarta Tanggap Covid-19 , 22 April 2022.

Pada Periode awal wabah pengobatan spesifik maupun terapi pencegahan seperti obat antiviral tertarget maupun vaksin belum tersedia sehingga fokus penanganannya adalah pendekatan kesehatan masyarakat seperti isolasi, karantina, serta pembatasan sosial maupun komunitas. Namun saat ini, vaksin telah ditemukan dan telah digunakan oleh beberapa Negara di dunia seperti Amerika, China, Turki, Brazil dan salah satunya adalah Indonesia. Penggunaan Vaksin di Indonesia telah dilakukan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo, sejumlah pejabat, tokoh agama, organisasi profesi serta perwakilan masyarakat yang dilansir dari website Kementerian Kesehatan RI pada 13 Januari 2021. Presiden menjadi orang pertama mendapat vaksin Covid-19 dengan tujuan untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman dan halal.

Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan target 1 juta dosis per hari dengan sasaran vaksinasi sebanyak tahap 1 dan 2 40.340.096, dan hingga saat ini total vaksinasi telah dilakukan pada tahap 1 sebanyak 32.063.745 dengan presentase 79,47% dan tahap 2 sebanyak 13.979.564 dengan presentase 34,60% per Juli 2021. Sebagian besar masyarakat Indonesia tidak bersedia divaksin dengan berbagai alasan salah satunya yaitu karena telah terpapar informasi tidak akurat atau bohong. Maraknya disinformasi dan penyebaran hoaks secara masif mengaburkan pemahaman masyarakat akan manfaat dan risiko vaksinasi Covid-19. Sehingga, tidak jarang informasi yang belum jelas kebenarannya menjadi dasar bagi mereka untuk menentukan keputusan besar dalam hidup.

Wabah COVID-19 sejak awal disertai oleh penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoax yang mempengaruhi persepsi serta pikiran masyarakat. Beberapa informasi palsu dan menyesatkan yang tersebar di masyarakat adalah seperti klaim bahwa mengenakan masker menghambat pernapasan. Klaim lain yaitu, bahwa vaksin Covid-19 mengandung mikrochip, beredar secara luas di berbagai platform digital sehingga mengganggu upaya pencegahan dan vaksinasi. Survei nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan *Katadata Insight Center (KIC)* pada tahun 2020 oleh menemukan bahwa antara 64 hingga 79 persen responden tidak dapat mengenali misinformasi di dunia maya. Mayoritas responden di dalam survei ini juga menyatakan media sosial sebagai sumber informasi mereka yang utama. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat adanya 1.556 berita hoaks terkait Covid-19 dan 177 berita tentang vaksin Covid-19 di media sosial maupun media digital.

Media sosial memainkan peran signifikan dalam mempengaruhi publik selama pandemi Covid-19, sebab publik sendiri cenderung mengutamakan informasi dari media sosial (Ahmad & Murad, 2020). Bridgman et al. (2020) mengidentifikasi bahwa terdapat hubungan yang kuat antara paparan media sosial dan mispersepsi tentang Covid-19 dan media sosial juga berhubungan dengan ketidakpatuhan masyarakat karena meningkatnya mispersepsi tentang Covid-19. Pada saat yang sama, pendekatan kesehatan masyarakat sebagai strategi untuk mengatasi pandemi membutuhkan kepatuhan masyarakat itu sendiri (Wu & McGoogan, 2020).

Informasi palsu menjadi salah satu tantangan atas berlangsungnya efektivitas komunikasi publik pemerintahan yang saat ini memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di Indonesia. Pemerintah sebagai satu-satunya sumber kredible dalam krisis pandemic Covid-19 dituntut untuk mampu menyediakan informasi yang cepat dan handal kepada masyarakat guna melawan informasi yang terjadi. Pada kenyataannya, dalam kebijakan untuk menghentikan penyebaran Covid-19, baik pemerintah maupun organisasi kesehatan belum cukup berhasil memberikan informasi

yang handal untuk merespon perkembangan kebutuhan informasi publik (Lovari, D'Ambrosi, & Bowen, 2020). Minimnya transparansi pada awal identifikasi Covid-19 menciptakan misinformasi publik sehingga menciptakan ruang bagi munculnya rumor dan spekulasi di ruang publik (Sohrabi et al., 2020). Selain itu, kecepatan respon komunikasi publik pemerintah yang dilakukan terhadap berita hoax setelah berita tersebar, sehingga hal ini memberikan ketidakpastian informasi terhadap masyarakat dan menyebabkan terjadinya kesenjangan pengetahuan di masyarakat.

Penggunaan media massa sebagai saluran komunikasi pemerintah selama masa pandemic Covid-19 menjadi alternatif terbaik untuk berkomunikasi dengan masyarakat dalam menyebarkan informasi dan merespon informasi yang ada. *Public Relations* sebagai fungsi yang bertanggung jawab dalam berhubungan dengan khalayak pemerintah memanfaatkan teknologi untuk dapat berkomunikasi. Dalam dunia *public relations* pemanfaatan teknologi internet dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab praktisi *public relations* disebut dengan Cyber PR.

Atas dasar permasalahan tersebut, penulis terinspirasi untuk meneliti tentang pengaruh pemahaman informasi program vaksinasi Covid-19 terhadap tingkat pengetahuan masyarakat Tanah abang. Sebab, banyaknya informasi yang tersebar di masyarakat terkait program vaksinasi Covid-19 menimbulkan beragam respon dan menciptakan beragam persepsi di masyarakat untuk itu melalui penelitian ini peneliti ingin melihat pengaruh dari pemahaman informasi terhadap tingkat pengetahuan masyarakat Tanah abang dengan menggunakan variabel antaseden yaitu latar belakang pendidikan dan latar belakang pekerjaan.

Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan metode kausal-comparative. Penulis menggunakan populasi masyarakat Kecamatan Tanah Abang yang dikategorikan berdasarkan latar belakang pekerjaan dan pendidikan untuk dijadikan sebagai tolak ukur peneliti dalam melihat pengaruh pemahaman informasi terhadap pengetahuan yang mungkin saja menimbulkan kesenjangan pengetahuan dalam penelitian ini. Penulis

memilih populasi dari Kecamatan Tanah abang karena hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani *Research and Consulting* (SMRC) pada 28 Februari 2021 - 8 Maret 2021 menunjukkan, jika warga di DKI Jakarta merupakan masyarakat yang paling banyak menolak untuk disuntik Vaksin Covid-19 dan Tanah abang menjadi kecamatan dengan kasus tertinggi di DKI Jakarta yaitu mencapai lebih dari 150 kasus.

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang "Pengaruh Pemahaman Informasi Program Vaksinasi Covid-19 terhadap Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tanah abang."

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1.2.1 Seberapa besar pengaruh pemahaman informasi program vaksinasi Covid-19 terhadap tingkat pengetahuan masyarakat Kec. Tanah Abang?
- 1.2.2 Apakah ada pengaruh Latar belakang Pendidikan pada pengetahuan masyarakat Kec. Tanah Abang?
- 1.2.3 Apakah ada pengaruh Latar belakang pekerjaan pada pengetahuan masyarakat Kec. Tanah Abang?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Mengukur seberapa besar pengaruh pemahaman informasi program vaksinasi Covid-19 terhadap tingkat pengetahuan masyarakat Tanah abang
- 1.3.2 Mengukur seberapa besar pengaruh Latar belakang pendidikan terhadap pemahaman informasi program vaksinasi Covid-19 terhadap tingkat pengetahuan masyarakat Kec. Tanah Abang
- 1.3.3 Mengukur seberapa besar pengaruh latar belakang pekerjaan

terhadap pemahaman informasi program vaksinasi Covid-19 terhadap tingkat pengetahuan masyarakat Kec. Tanah Abang

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1.4.1 Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan serta menerapkan teori-teori ilmu komunikasi dengan menggunakan metode kuantitatif dalam menganalisa pengaruh pemahaman informasi program vaksinasi Covid-19 terhadap tingkat pengetahuan masyarakat Tanah abang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti, civitas akademik dan pemerintah mengenai salah satu kajian di bidang ilmu komunikasi dan komunikasi masa.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam menangani permasalahan dan krisis.
3. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merespon menghilangkan jika tidak meminimalisir dampak informasik dimasyarakat.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pegangan pemerintah dalam merespon krisis dalam komunikasi publik.